

**PATRONASE POLITIK DALAM KEPEMIMPINAN IKSAN ISKANDAR
DIKABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2013-2018**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**

DISUSUN OLEH :

EFENDI AL QADRI MULYADI

E 111 14 306

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PATRONASE POLITIK DALAM KEPEMIMPINAN IKSAN ISKANDAR
DIKABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2013-2018**

Disusun dan diajukan oleh:

EFENDI AL QADRI MULYADI

E 111 14 306

Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada Program Studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Makassar, 7 Juni 2021

Menyetujui,
Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si

Sekretaris : A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si

Anggota : Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D

Anggota : Dr. Phil. Sukri, M.Si

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si

Pembimbing 2 : A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si

Handwritten signatures of the examination committee members, including the Chairman, Secretary, and members, corresponding to the printed names on the left.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PATRONASE POLITIK DALAM KEPEMIMPINAN IKSAN ISKANDAR DI
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2013 - 2018**

Yang diajukan oleh :

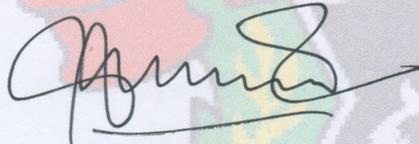
EFENDI AL-QADRI MULYADI

E111 14 306

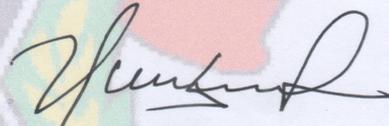
Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Makassar, Mei 2021

Menyetujui,

Pembimbing I **UNIVERSITAS HASANUDDIN** Pembimbing II



Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP.19651109 199103 1008



A.A. Armunanto, S.IP, M.Si
NIP.19801114 200812 1 003

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H.A. Yakub, M.Si. P. hD
NIP.196212311990031023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Efendi Al Qadri Mulyadi
NIM : E 111 14 306
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

“PATRONASE POLITIK DALAM KEPEMIMPINAN IKSAN ISKANDAR DIKABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2013-2018”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Juni 2021

Yang menyatakan



Efendi Al Qadri Mulyadi

Kata Pengantar



Segala puji serta dengan penuh rasa syukur yang dalam, penulis memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya kepada Allah SWT, pencipta langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, pemilik kesempurnaan, meliputi segala ilmu pengetahuan serta kuasa yang tiada batas kepada penulis, serta sholawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan dari hati yang paling dalam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari kedua orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup di dunia ini, yang sangat penulis cintai dan sayangi, Ayahanda H. Mulyadi Mustamu, SH dan Ibu Hj. Yaisa, S.Pd yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, cinta dan pengorbanan keringat dan air mata. Untaian doa serta pengharapan tiada henti, yang hingga kapan dan dimanapun penulis tidak akan bisa membalasnya. Keselamatan dunia dan akhirat semoga selalu untukmu.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dalam hal ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Terima kasih kepada ibu Prof. Dwi Aries Tina, MA selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Armin, M.SI selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga sebagai dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Drs. H. A. Yakub, M.SI selaku ketua prodi Ilmu Politik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Armin, M.SI dan Andi Ali Armunanto S.IP M.SI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan dan memberi bimbingan kepada saya. Terimah kasih atas saran dan masukan yang di berikan untuk penelitian ini sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Andi ali armunanto S.IP M.SI selaku dosen pembimbing akademik penulis yang senangtiasa mendampingi penulis selama masa perkuliahan.
6. Dosen-Dosen dan staff pengajar Depertemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan terkhusus pada prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Alm. Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, Prof. Dr. Basyir Syam, Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Dr. Muhammad Saad, , Dr. Ariana Yunus, S.IP M.SI., Dr. Gustiana

S.IP. M.SI., . M.SI, Imran S.IP. M.Si, Endang Sari, S.IP, M.SI, Zulhajar S.IP. MA., Haryanto, S.IP. MA., dan Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.

7. Seluruh Staf Pegawai Departemen Ilmu Politik, Pak Adit, Pak Hamsah, Pak Mursalim, Ibu Hasna, dan Pak Nadir yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas-berkas perkuliahan, terima kasih bapak ibu.
8. Saudara-saudara senasib dan seperjuangan, yang kesetiaan pengorbanan dan perjuangannya selalu di hati. Amandemen 2014 Universitas Hasanuddin Ade, Finny, Rini, Vini, Guntur, Rifki, Yusran, Ganang, Mukmin, yayat, arno, Ilham, Dirwan, Uci, Syarfan, Gaus, Tuti, Ica, Icwan, Iyya, Ona, Rahmi, Sufri, Yusuf, Ram, Yunita, Afra, Ana, Husnul, Nindi, Ardi, Fitri, Faldos yang penulis cintai terimah kasih atas cinta yang kalian berikan.
9. Terimah kasih kepada Komunitas Oase Turatea yang telah memberikan ruang diskusi terkait penelitian penulis.

Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan di sini. Dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasi yang tak terhingga. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik sangat penyusun harapkan. Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah berhubungan dengan penulis. Sekecil apapun perkenalan yang ditakdirkan tersebut. Sungguh suatu hal yang amat luar biasa bagi penulis diatas

segalanya, Kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan mereka dalam kehidupan penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermamfat bagi jurusan ilmu politik dan almamater Universitas Hasanuddin serta masyarakat Indonesia pada umumnya, Amin Ya Rabb Al-Alamin.

Makassar, 7 JUNI 2021

Efendi Al Qadri Mulyadi

ABSTRAK

EFENDI AL QADRI MULYADI E11114306. Patronase Politik dalam Kepemimpinan Ikhsan Iskandar di Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2018. Di bawah bimbingan oleh Armin Arsyad selaku pembimbing I Dan A.Ali Armunanto.S selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan yakni untuk Menggambarkan Bentuk patronase politik dalam kepemimpinan Ikhsan Iskandar di Kabupaten Jeneponto periode 2013 – 2018 dan dampak yang dihasilkan dari patronase yang diterapkan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan mewawancarai beberapa informan yang terlibat langsung serta mengerti tentang patronase politik dalam kepemimpinan Ikhsan Iskandar di Kabupaten Jeneponto. Selain wawancara, peneliti juga memperoleh data dengan cara studi putaka dari berbagai sumber yakni buku, jurnal, dan sumber data pendukung lainnya. Dianalisis secara deskriptif dan disajikan secara kualitatif.

Hasil dari pada penelitian ini menjelaskan bahwa Bentuk Patronase Politik Ikhsan Iskandar sebagai Patron terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Klien terletak pada pengisian posisi atau jabatan pada struktur pemerintahan. Ikhsan Iskandar sebagai Bupati mempunyai Hak Prerogatif dalam penentuan posisi/jabatan. Sehingga ASN yang berkeinginan mengisi posisi/jabatan tertentu harus memperjuangkan Ikhsan Iskandar (patron) di kontestasi Pilkada. Sehingga Ikhsan Iskandar sebagai Patron dan ASN sebagai Klien sama-sama diuntungkan, dikarnakan kedua belah pihak telah mencapai kepentingannya masing masing.

Kata kunci : Patronase Politik, Patron, Klien

ABSTRACT

EFENDI AL QADRI MULYADI E11114306. Political Patronage in Iksan Iskandar's Leadership in Jeneponto Regency 2013-2018. Under guidance by Armin Arsyad as supervisor I and A. Ali Armunanto.S as mentor II.

This study aims to describe the form of political patronage in Iksan Iskandar's Leadership in Jeneponto Regency For the Period 2013-2018 and the impact from the patronage applied

This research was conducted in Jeneponto Regency using descriptive research type. The research data were obtained by interviewing several informants who were directly involved and understood about political patronage in the leadership of Iksan Iskandar in Jeneponto regency. In addition to interviews, researchers also obtained data by means of putaka studies from various sources, namely books, journals, and other supporting data sources. Descriptive analyzed and presented qualitatively.

The results of this study explain that Iksan Iskandar's form of political patronage as a Patron to the Civil Servant as a client lies in filling a position in the government structure. Iksan Iskandar as the Regent has the Prerogative Right in determining the position. So that Civil Servant wishing to fill a certain position must "fight" for Iksan Iskandar (patron) in the election. So that Iksan Iskandar as a Patron and Civil Servant as a client gain mutual benefit, because both parties have achieved their respective interests.

Keywords: *Political Patronage, Patron, Client*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Patronase dan Klientalisme.....	9
2.1.1 Patronase	12
2.1.2 Klientalisme	15
2. 2 Kepemimpinan Politik.....	17
2.3 Kerangka Pemikiran	20
2.4 Skema Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi Penelitian	23
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian	23

3.3 Sumber Data	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Penetapan Informan	26
3.6 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
4.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	29
4.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Jeneponto	30
4.3 Keadaan Aparatur Sipil Negara.....	31
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
5.1 Bentuk Patronase Politik Iksan Iskandar Dikabupaten Jeneponto Tahun 2013-2018.	37
5.1.1 Bentuk Patronase Politik Iksan Iskandar di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.....	38
5.1.2 Bentuk Patronase Politik Iksan Iskandar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.	41
5.2 Dampak Patronase Politik Iksan Iskandar di Kabupaten Jeneponto Periode 2013-2018.....	45
5.2.1 Kinerja Pemerintahan.....	45
5.2.2 Pengelolaan Keuangan.	46
5.2.3 Pelayanan Publik	47
5.2.4 Perilaku Masyarakat.	51

BAB VI PENUTUP	52
6.1 Kesimpulan.....	52
6.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57
Dokumentasi penelitian	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan mengenai sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Demokrasi sebagai suatu proses yang telah meniscayakan semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. Di banyak negara berkembang, tampaknya sulit untuk direalisasikan kesejatiannya. Dibukanya sistem pemilihan umum secara langsung yang merupakan desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi yang tinggi, dimana pemilu merupakan jantung dari demokrasi masyarakat bebas memilih siapa yang akan jadi pemimpinnya. Pemilu di Indonesia baru dimulai pada tahun 2004 dan telah melahirkan banyak pemimpin yang sukses. Sedikit demi sedikit pemilu di Indonesia berkembang mulai dari pemilihan Umum presiden, gubernur, dan walikota/bupati, serta bahkan pemilu sudah masuk kedesa dengan diadakannya pemilihan kepala desa. Perkembangan politik di Indonesia menyebabkan banyak strategi-strategi yang dipakai oleh aktor politik untuk memenangkan suatu pemilihan kepala daerah.

Peralihan masa orde baru ke reformasi juga merupakan awal dimana Indonesia mengalami krisis kepemimpinan. Mencari sosok pemimpin yang memiliki integritas intelektual dan etik-moral menjadi barang langka dan sukar untuk ditemukan. Karena selama beberapa dasawarsa ini setiap pemimpin politik di Indonesia cenderung kolusif, nepotif, koruptif. Akibat dari fenomena tersebut adalah terjadinya degradasi kepercayaan (*trusting leader*) terhadap kepemimpinan saat ini karena tidak mampu mengangkat kehidupan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Bahkan dalam pandangan sebagian rakyat Indonesia, justru pemimpin-pemimpin yang ada sekarang semakin membawa keterpurukan yang sudah terjadi sebelumnya.

Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan).¹ Pemimpin politik umumnya lebih menggunakan hubungan-hubungan formal dan personal dalam menggerakkan bawahan dan masyarakatnya untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep kepemimpinan politik merupakan suatu hal yang pokok dalam sistem politik, kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini memunculkan beberapa aspek yang terkandung dalam kepemimpinan politik yaitu terdapat adanya pengaruh dalam kepemimpinan politik, konteks

¹ Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin politik*, Jakarta; Gramedia pustaka Utama, 2009, hlm. 12

kepemimpinan politik adalah kelompok, serta adanya unsur pencapaian suatu tujuan.²

Patron klien tumbuh subur pada masyarakat yang memiliki persoalan sosial, dan ekonomi yang kompleks seperti minimnya sumber daya alam yang tersedia. Lapisan sosial masyarakat yang mengalami umumnya di kalangan petani, nelayan, dan pedagang. Di pedesaan atau pinggiran kota, bentuk hubungan antara patron (tuan) klien (pekerja), dengan cara memberikan bantuan terhadap keperluan klien misalnya kemudahan untuk memperoleh lapangan usaha, pinjaman untuk kebutuhan mendadak (sakit, biaya sekolah anak, konsumtif).⁶ Klien menerima kebaikan tersebut sebagai "hutang budi", menghargai, dan berkomitmen untuk membantu patron dengan jasa dan tenaga yang mereka miliki. Pola - pola relasi sosial yang demikian dapat dilihat pada hubungan antara pemilik lahan pertanian luas (petani kaya) dengan para buruh taninya dan orang - orang di sekitarnya yang kemampuan ekonominya terbatas.

Tujuan dasar dari hubungan patron dan klien sebenarnya adalah menyediakan jaminan sosial bagi subsistensi dan keamanan. Apabila hubungan pertukaran yang menjadi dasar pola hubungannya patron dan klien ini melemah karena tidak memberikan jaminan sosial yang mendasar bagi subsistensi dan keamanan maka klien akan mempertimbangkan hubungannya dengan patron menjadi tidak adil dan eksploitatif. Oleh sebab

² Ibid, hlm. 65

itu tidak mengherankan apabila ada tuntutan dari pihak klien terhadap patronnya untuk memenuhi janji-janji ataupun kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Hubungan seperti ini sifatnya akan langgeng dan permanen jika masing-masing pihak menemukan kesesuaian dan manfaatnya.

Merujuk pada uraian diatas, patronase mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Disatu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Di lain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki seorang patron. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan pertukaran kepentingan. Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron.³

³ Leo Agustino, Patronase Politik Era Repormasi Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar Dan Provinsi Jambi, Jurnal Administrasi Publik Vol.11, 2, 2014.

Nilai-nilai yang mendasari hubungan patron-klien merupakan nilai-nilai yang kurang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan birokrasi modern. Dalam hubungan patron-klien baik patron maupun klien masing-masing pihak tidak diinginkan bersikap kritis terhadap pihak yang lain. Salah satu pandangan utama yang mendasari relasi ini adalah "right or wrong my patron/leader" (pada pihak klien) dan "right or wrong my client/ follower" (pada pihak patron). Seorang klien tidak akan menyalahkan atau mencela patronnya, tetapi akan membela mati - matian atau sebisanya. Demikian pula patronnya. Oleh karena itu, kekalahan seorang patron dalam suatu Pilkada tidak akan mudah diterima. Jika klien atau pengikut menerima begitu saja kekalahan tersebut akan muncul kesan bahwa klien tidak berbuat apa-apa atas kekalahan tersebut atau tidak membalas jasa patron kepada klien.⁴

Merujuk pada realitas yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, penulis memaparkan persoalan ini berdasarkan masih kuatnya intervensi kekuasaan pemimpin daerah dalam hal ini bupati (patron) terhadap bawahan dalam hal ini aparatur pemerintahan (klien) dalam hal kepemimpinan politik untuk mengarahkan hak suara dan keberpihakan bawahan dalam berbagai aspek terhadap calon yang di dukunginya. Ini kerena keterikatan bawahan (Klien) terhadap pemimpin (patron) sehingga mendominasi dirinya pada kurun waktu periode masa baktinya. Bahkan,

⁴ <http://www.search.ask.com/> Konteks Sosial Budaya Demokrasi di Sulawesi-Selatan. (diakses tanggal 21 Agustus 2019 pukul 18.14 WITA).

tidak hanya itu, para klien mengabdikan dirinya atas kepentingan politik patron.

Sepertihalnya yang terjadi di kabupaten jeneponto selama 5 tahun kepemimpinan Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si dimana terdapat intervensi yang bertujuan untuk memobilisasi para aparatur pemerintahan dibawahnya untuk memberikan sumbangsih terhadap keberlangsungan kepemimpinannya. Pola patronase politik yang terbangun antara Iksan Iskandar dan aparat pemerintahan dibawahnya terletak pada bagaimana Bupati mengontrol para kliennya dengan cara memanfaatkan kekuasaannya dalam penentuan jabatan dsb, sehingga para aparat yang dalam hal ini disebut klien memiliki ketergantungan terhadap sang patron agar tetap dapat terakomodasi.

Jeneponto merupakan daerah dimana patronase masih sangat kuat mengakar di dalam masyarakat sehingga patronase dalam kepemimpinan politik betul – betul mempengaruhi realitas politik dilapangan. Iksan Iskandar memanfaatkan hal ini didalam kepemimpinannya dalam periode 2013 – 2018 guna melanggengkan kekuasaannya termasuk dalam menghadapi periode keduanya. Melalui penelitian ini penulis bermaksud melihat bagaimana bentuk patronase politik dalam kepemimpinan Iksan Iskandar di Kabupaten Jeneponto tahun 2013 – 2018.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk patronase politik antara Bupati dan aparatur pemerintahan dalam kepemimpinan Ikhsan Iskandar di Kabupaten Jenepono periode 2013 - 2018?
2. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari patronase politik Iksan Iskandar di Kabupaten Jenponto periode 2013-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan patronase politik dalam kepemimpinan Ikhsan Iskandar di Kabupaten Jenepono periode 2013 – 2018, Serta dampak yang dihasilkan dalam patronase yang di terapkan.

1.4 Manfaat Penulisan

A. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai hal yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Politik dalam hal pemahaman terkait patronase dan kepemimpinan politik.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian – penelitian sejenis nantinya yang berkaitan dengan patronase dan klientalisme politik.
3. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir menyangkut penerapan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun karya ilmiah sejenis.
3. Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang patronase dan klientalisme.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Patronase dan Klientalisme

Kata patron berasal dari bahasa latin pater yang berarti bapak, dari bapak berubah menjadi patris dan patronis yang berarti bangsawan atau patricius yang berarti seseorang yang dianggap pelindung sejumlah rakyat jelata yang menjadi pengikutnya. Sebaliknya klien atau client berasal dari kata cliens yang berarti pengikut. Mereka ini adalah orang-orang merdeka yang sejak awal atau bekas budak yang dimerdekan. Mereka menggantungkan diri pada patron, bahkan kadang menggunakan nama paham sang patron.⁵

Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai patronase di artikan sebagai pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kepentingan, dalam rangka mendapatkan dukungan politik mereka. Patronase juga merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu dan kepada kelompok komunitas.

⁵ Fadli Ichsan, Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kampala, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Filsafat & Politik, Jurusan Ilmu Politik (Universitas Islam Negeri, 2016), h.28

Tidak sedikit ilmu sosial yang berusaha untuk menjelaskan ikatan patron klien yang terjadi di tengah masyarakat. Dari hasil-hasil tersebut, dapat diketahui bahwa secara garis besar terdapat dua alasan yang melatarbelakangi mengapa hubungan patron-klien itu terjadi. Pertama, relasi patron klien terjadi sebagai salah satu upaya manusia untuk dapat bertahan hidup dalam suatu keadaan tertentu. Dalam hal ini para ahli umumnya menitik beratkan analisisnya pada sudut pandang pihak klien, termasuk didalamnya situasi lingkungan yang dihadapi klien. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti perspektif patron hanya dapat diabaikan begitu saja. Kedua, relasi patron-klien terjadi akibat adanya kondisikondisi tertentu dalam suatu masyarakat.

Menurut Scott bahwa hubungan patron-klien adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (Klien), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.⁶

Menurut Scott, gejala patron-klien dipengaruhi oleh tiga kondisi, pertama terdapatnya perbedaan (inequality) yang menyolok dalam

⁶ Heddy Shri Ahimsa Putra, Edisi terbaru Patron & Klien di Sulawesi Selatan, (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), h.4

kepemilikan kekayaan, status, dan kekuasaan. Tradisi yang berlaku, seorang patron lebih mendasarkan pada kekuatan serta jalur untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan, dan bukannya pada pewarisan kedudukan. Kedua, tidak adanya pranata-pranata yang menjamin keamanan individu, baik yang menyangkut status maupun kekayaan. Ketika keamanan seseorang terancam dan kontrol sosial tidak dapat lagi dijadikan sebagai acuan maka hubungan patronase dipilih sebagai mekanisme atau sarana untuk memperoleh keamanan pribadi.

Ketidakamanan akan muncul dalam lingkungan yang ditandai oleh kelangkaan sumber-sumber daya, dan usaha mendapatkan kekayaan serta kekuasaan yang dipandang sebagai persaingan yang bersifat zero-sum, yaitu keuntungan yang didapat satu pihak diartikan sebagai suatu kehilangan bagi pihak lain. Dengan demikian, ikatan-ikatan pribadi secara langsung telah mengganti peranan hukum, nilai-nilai bersama serta pranatapradata yang kuat. Ketiga, yang juga merupakan implikasi definisi hubungan patronase adalah ketika ikatan-ikatan kekeluargaan tidak lagi dapat diandalkan untuk mendapatkan perlindungan serta memajukan diri.

Ditambahkan Martin Sheffter, bahwa patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik mereka. Sementara menurut Paul Hutchcroft patronase juga merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak

proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu dan kepada kelompok komunitas.⁷

Politik patronase sebagai kekuatan kohesi yang memainkan peranan penting dalam sistem politik tertentu. Misalnya politisi (patron) yang sangat kaya telah mendominasi demokrasi Indonesia, juga menekankan pada tema patronase sebagai perekat politik. Namun demikian, patronase menegaskan bahwa pertukaran kepentingan kerap muncul disaat kampanye pemilu, hubungan antara aktor dan pemilih, dan bagaimana relasi seperti ini di perlanjar dengan adanya keterikat kepentingan antara patron dan klien.

2.1.1 Patronase

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para

⁷ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Patronase dan Klientelisme dalam Politi Elektoral di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Polgov, 2015), h. 3-4.

pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal money politics dan vote buying) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang di biyai oleh pemerintah).

Dalam literatur Ilmu Politik, Pork barrel adalah salah satu bentuk dari politik distributif, dimana politisi (baik lembaga legislatif maupun eksekutif) berusaha untuk mengalokasikan sumber daya material dari negara kepada pendukungnya dalam kerangka mobilisasi dukungan elektoral. Para politisi berusaha mewujudkan program yang konkret kepada konstituennya dalam rangka terpilih kembali di pemilu berikutnya. Dari sisi yang lain, konstituen berusaha mendapatkan program material dari negara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Praktik ini sebenarnya berlangsung di banyak negara, termasuk negara-negara yang demokrasinya sudah mapan.⁸

Pork barrel juga sering disebut sebagai politik distribusi (*distributive politics*) dapat di definisikan sebagai suatu bentuk penyaluran bantuan materi (sering dalam bentuk kontrak, hibah, atau proyek pekerjaan umum) ke kabupaten/ kota dari pejabat terpilih. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pork barrel berasosiasi dengan proyek-proyek pekerjaan publik seperti proyek perbaikan jalan, perbaikan fasilitas di sekitar sungai, dan perbaikan pelabuhan. Proyek - proyek perbaikan fasilitas publik tersebut

⁸ Ibid

sering dijadikan contoh klasik pork barrel yang disitir dalam banyak literatur kajian politik pork barrel. Hal ini bukan berarti bahwa pork barrel hanya mencakup proyek-proyek fisik berupa perbaikan fasilitas publik, tetapi pork barrel juga dapat mengambil bentuk distribusi kesejahteraan.

Meskipun demikian, ada perbedaan antara patronase dengan materi-materi yang bersifat programatik (*programmatic goods*), yaitu materi yang diterima oleh seorang yang menjadi target dari program-program pemerintah, misalnya, program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin. Perbedaan antara patronase dan klientelisme juga dapat ditilik dari karakteristiknya masing-masing. Karakteristik yang memberikan ciri spesifik dari patronase adalah relasi patron-klien yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah. Sedangkan karakteristik utama dari klientelisme menurut adalah bersifat timbal-balik, hierarkis, dan berulang (tidak terjadi sekali saja). Ada juga keterangan bahwa relasi dua arah (dalam patronase) bisa saja berubah menjadi tiga arah jika si patron berubah menjadi Perantara yang menjembatani klien mereka dengan komunitas di luarnya, inilah yang kemudian di sebut sebagai klientelisme. Itulah mengapa banyak studi yang kemudian memberikan judgement bahwa salah satu ciri utama lainnya dari klientelisme adalah adanya sosok Perantara.

Namun, tidak setiap praktek patronase juga bersifat klientelistik. Kandidat yang memberikan sumber daya baik berupa barang maupun jasa

kepada pemilih yang tidak pernah ditemui oleh sang kandidat atau tidak akan ditemui lagi tidak dapat dipahami sebagai klientelisme. Sebab, karakter lain yang melekat pada relasi klientelistik adalah adanya relasi berulang (*iterative*) dan bukan relasi tunggal (*one-off*). Dengan demikian, dalam sebuah relasi, elemen timbal balik kadang tidak terjadi karena si penerima pemberian tidak merasa terbebani untuk membalas pemberian sang patron dengan cara si penerima memilih sang patron dalam pemilu. Oleh sebab itu, bagi kajian tersebut, relasi pertukaran sumber daya yang saling menguntungkan dapat menjadi relasi patronase, namun tidak semua relasi patronase memiliki karakter relasi klientelistik.

Argumentasi ini menjadi menarik di tengah perdebatan teoritik antara pendukung gagasan yang menyamakan antara patronase dan klientelisme dengan para sarjana yang membedakan konsep keduanya. Namun, disini penulis tetap pada definisi dimana patronase dan klientelisme adalah dua hal yang berbeda, disatu sisi penerapannya berbeda namun di sisi yang lain patronase dan klientelisme pun bisa bergandengan dalam penerapannya bahkan bisa saling menguatkan.

2.1.2 Klientelisme

Secara harfiah istilah klientelisme berasal dari kata "*cluere*" yang artinya adalah "mendengarkan atau mematuhi". Kata ini muncul pada era Romawi kuno yang menggambarkan relasi antara "*clientela*" dan "*patronus*". "*Clientela*" pada era ini adalah istilah untuk menyebut kelompok

orang yang mewakili suaranya kepada kelompok lain yang disebut “*patronus*”, yang merupakan sekelompok aristokrat. Selanjutnya, disebutkan bahwa “*clientela*” merupakan pengikut setia dari “*patronus*”).

Konsep klientalisme sering ditempatkan dalam posisi yang memiliki arti berbeda dengan patronase (*patronage*). Konsep patronase didefinisikan sebagai relasi dua arah ketika seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (*klien*) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron. Terdapat beberapa karakter yang memberikan ciri spesifik patronase. Karakteristik tersebut mencakup relasi patron-klien yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara dan bersifat dua arah. Relasi dua arah dapat berubah menjadi relasi tiga arah apabila di dalam suatu komunitas, patron juga berfungsi sebagai Perantara untuk menjembatani relasi klien mereka dengan pihak-pihak lain di luar komunitas mereka.⁹

Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang didalamnya mengandung elemen iterasi, status *inequality* dan *resiprokal*). Kemudian, klientelisme juga adalah relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas,

⁹ Aspinaal, Ed dan Barendschod, W. Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. 2019. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

hierarkis dan iterasi. Maka dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam kajian politik, klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya. Dari pendapat ahli ini dapat diketahui bahwa klientelisme memiliki beberapa elemen kunci. Tiga elemen klientelisme yaitu iterasi, asimetri, dan resiprositas. Selain itu, menurut ahli lain empat komponen klientelisme yaitu personalistik, resiprositas, hirarki dan iterasi. Namun dari dua ahli tersebut, setidaknya dapat ditarik benang merah bahwa klientelisme memiliki empat elemen karakteristik: iterasi, asimetris, resiprositas dan personalistik.

2.2 Kepemimpinan Politik

Istilah Kepemimpinan dalam kepemimpinan politik ialah seseorang yang memimpin (aktor) dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mempergunakan segala atribut yang melekat padanya dengan cara mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Sedangkan sebutan politik dalam hal kepemimpinan menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga - lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan).

Sedangkan Harold Lasswell mengkategorisasikan Kepemimpinan politik seperti berikut.¹⁰ :

1. Proses kepemimpinan: Kepemimpinan demokrasi yang menganggap kekuasaan dibagi dengan orang lain dan dilaksanakan untuk menghormati martabat pribadi manusia.
2. Karakter pemimpin: Karakter politik yang dimaksud berupa seberapa aktif pemimpin dalam menunaikan tugasnya, dan seberapa tinggi pemimpin menilai tugasnya.
3. Hasil proses kepemimpinan: Dalam hal ini kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu ekstrimis yang merupakan pemimpin yang berupaya menghancurkan seluruh rezim lama dan menggantinya dengan sistem yang baru sama sekali. Pemimpin yang moderat masih tetap mempertahankan unsur-unsur rezim lama. Tipe pemimpin wiraswasta adalah orang yang menciptakan atau mengolaborasikan secara luas organisasi publik sehingga mengubah pola alokasi sumber-sumber publik yang jumlahnya terbatas.

Pembahasan mengenai kepemimpinan politik adalah perihal masalah realisasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin, dan berkembang menjadi hasil interaksi antara individuindividu, kelompok, lembaga, organisasi dengan pemimpin tersebut, setidaknya berputar pada permasalahan bagaimana kekuasaan aktor (pemimpin) mempergunakan

¹⁰ Harold Lasswell, "Psychopathology and Politics", 1970, University of Chicago Press

semua sumber daya yang ada untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan guna dalam hal untuk pencapaian suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, maka dapat pula dinyatakan bahwa gaya dalam kepemimpinan politik dapat dilihat sebagai salah satu konsep pendekatan yang dipakai dalam menganalisis perilaku politik pemimpin, yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan serta bagaimana memposisikan diri dan mengembangkan pengaruhnya. Gaya kepemimpinan politik, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Sebagaimana Hersey dan Blanchard berpendapat bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi dan kondisi sosial dimana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan.¹¹

Menurut Hersey dan Blanchard, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan bersama. Kepemimpinan akan berjalan dengan baik jika pemimpin mempunyai kecakapan dalam bidangnya, dan setiap pemimpin mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. Sedangkan bawahan adalah seorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu perkumpulan atau pengikut yang

¹¹ Miftah Thoha, "Kepemimpinan Dalam Manajemen", Jakarta, :Rajawali Pers, 2009

setiap saat siap melaksanakan perintah atau tugas yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan. Dalam suatu lingkungan birokrasi, bawahan mempunyai peranan yang sangat strategis, karena sukses tidaknya seseorang perihal kepemimpinan politik bergantung kepada peranan mesin birokrasi secara efektif. Adapun situasi dan kondisi sosial adalah suatu keadaan dimana seorang pemimpin politik berusaha pada saat-saat tertentu mempengaruhi atau mengambil keputusan dalam rangka mencapai kehendak umum.¹² Dalam satu situasi misalnya, tindakan pemimpin politik pada beberapa tahun yang lalu tentunya tidak sama dengan yang dilakukan pada saat sekarang, karena memang situasi dan kondisi sosial telah berubah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Patronase politik merupakan keadaan dimana subjek dalam hal ini patron dan objek dalam hal ini klien, memiliki kaitan dan hubungan yang sangat erat baik dalam hal ekonomi maupun politik. Kepala daerah memiliki power dalam hal mengoptimalkan kekuasaan dan wewenangnya untuk mempengaruhi para kliennya.

Kabupaten Jeneponto dimana pola patronase politik masih sangat kuat mengakar ditengah masyarakat terutama masyarakat tradisonal. Patronase politik yang kemudian muncul di Kabupaten Jeneponto erat

¹² Jean-Jaques Rousseau "Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik" Jakarta:Dian, Rakyat,1989 hlm 27

kaitannya dengan kekuatan elit politik lokal dimana kepala daerah dalam hal ini Bupati menggunakan hegemoni politiknya dalam mengendalikan peran birokrat – birokrat dibawahnya dalam jalannya pemerintahan. Selain mengandalkan hegemoni Ikhsan Iskandar sebagai kepala daerah, ia juga mengandalkan patronase politik lokalnya terhadap masyarakat – masyarakat tradisional.

Melalui konsep patronase dan kekuatan elit Iksan Iskandar berusaha untuk melanggengkan hegemoni kekuasaaanya selama masa jabatannya terlebih lagi guna menghadapi periode keduanya. Pemeliharaan terhadap basis politik dan para kliennya mutlak dilakukan diperiode keduanya, melalui hal tersebut penulis bermaksud melihat bagaimana patronase politik terbangun dalam kepemimpinan Iksan Iskandar selama periode pertamanya.

2.4 Skema Kerangka Pikir

